

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi revisi anggaran yang berfokus terhadap alur proses atau mekanisme pelaksanaannya dan kendala yang dihadapi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung tahun 2021. Anggaran diperlukan untuk menjalankan suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menyusun sebuah dokumen rencana keuangan yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja (APBN). Pada pelaksanaannya, dokumen keuangan yang telah direncanakan sering kali mengalami ketidaksesuaian. Faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian tersebut ialah perubahan kondisi dan/atau prioritas kebutuhan. Dengan demikian, satker perlu melakukan penyesuaian terhadap rincian anggaran yang telah ditetapkan melalui proses revisi anggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah penelitian kualitatif yang terbagi menjadi dua teknik pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan revisi anggaran yang dilakukan pada Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses revisi anggaran di masa mendatang.

Kata kunci: APBN, Revisi Anggaran, Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Abstract

This study discusses the implementation of budget revisions that focus on the process flow or implementation mechanism and the obstacles faced at the Regional Office of the Directorate General of Treasury (Kanwil DJPb) Lampung Province in 2021. A budget is needed to run a government. Therefore, the Indonesian government compiled a financial plan document that was realized through the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). In practice, the financial documents that have been planned often experience discrepancies. Factors that can cause this discrepancy are changes in conditions and/or priority needs. Thus, the satker needs to make adjustments to the budget details that have been determined through the budget revision process. The research method used in writing this paper is qualitative research which is divided into two data collection techniques, namely, literature study and field study. Through this research, it can be concluded that the implementation of the budget revision carried out at the Regional Office of DJPb Lampung Province is in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are still some obstacles that need to be followed up in order to improve the efficiency and effectiveness of the implementation of the budget revision process in the future.

Keywords: APBN, Budget Revision, Regional Office of DJPb Lampung Province